

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat senantiasa akan selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada masa sekarang dengan keadaan masa lampau. Misalnya, di masa lalu kedudukan suami sangat dominan dalam segala urusan rumah tangga, khususnya dalam hal ekonomi keluarga. Akan tetapi, saat ini peran suami tidak selalu sebagai penentu jalannya roda perekonomian keluarga. Begitu pula dengan peran wanita dalam roda politik dan pemerintahan. Di masa yang lalu wanita dianggap tabu dan tidak pantas dijadikan sebagai pemimpin sebuah negara atau pemerintahan. Akan tetapi saat ini, baik wanita maupun pria sama-sama memiliki kesempatan untuk bisa aktif di bidang politik dan pemerintahan.

Laju perubahan tidak selalu sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Misalnya, masyarakat kota lebih cepat dalam mengalami perubahan sosial, sedangkan masyarakat desa cenderung lebih lambat. Demikian juga masyarakat terasing (terisolasi) dan masyarakat terbuka dalam berhubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang terisolasi cenderung menutup diri terhadap masyarakat lain sehingga akan tertutup pula terhadap perubahan-perubahan yang datangnya dari luar. Sebaliknya, masyarakat terbuka bersifat terbuka dalam hubungannya dengan masyarakat luas.

Perubahan-perubahan masyarakat terjadi terhadap nilai-nilai sosial, norma-norma, pola-pola perilaku organisasi susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan kewenangan interaksi sosial dan lain sebagainya. Dari sisi lain dari wujudnya, kebudayaan dapat dibedakan atas tiga yaitu (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan. (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta berpola dari manusia dalam masyarakat. (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Humbang Hasundutan adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Utara yang ibukotanya adalah Doloksanggul. Kabupaten ini dulu adalah bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara. Selama menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara, daerah Humbang ini merupakan salah satu daerah yang masih cukup tertinggal baik dari segi ekonomi dan juga dari segi pemerintahannya, karena pada masa itu mayoritas penduduknya berpenghasilan dari bertani. Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, menjadi peluang munculnya wacana perlunya usul pemekaran melalui pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Berbekal keinginan untuk mendambakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peluang tersebut dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat di wilayah Humbang Hasundutan melalui Panitia Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan. Ternyata sejalan dengan tuntutan kemajuan jaman mampu

menumbuhkan aspirasi masyarakat untuk mengusulkan Pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara, melalui usul pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Aspirasi murni masyarakat tersebut disambut dan di fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, serta dukungan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, yang kemudian memperoleh dukungan Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Maka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 pada tanggal 28 Juli 2003 menjadi hari resminya Humbang Hasundutan ini menjadi sebagai Kabupaten dan beribukota di Doloksanggul.

Humbang Hasundutan terdiri atas 10 Kecamatan. Kesepuluh Kecamatan itu adalah Kecamatan Parlilitan, Pakkat, Tarabintang, Doloksanggul, Pollung, Onan Ganjang, Sijamapolang, Lintong Nihuta, Paranginan dan Kecamatan Bakti Raja.

Mayoritas penduduk Humbang Hasundutan adalah petani. Beberapa komoditas unggulan dalam pertanian yakni Kopi dan perkebunan lainnya seperti kemenyan, karet, kayu manis, kemiri, coklat, kelapa sawit, aren, kelapa, tebu, jahe, cengkeh dan andaliman. Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan sekarang ini umumnya adalah etnik Batak Toba, Simalungun, Nias, Tionghoa, dan lain-lain.

Dalam segala aspek kehidupan masyarakat Humbang Hasundutan selalu dikaitkan dengan kebiasaan adat-istiadat yang telah diwarisi turun temurun dari para leluhurnya namun tidak terlepas dari ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Humbang Hasundutan. Hal ini tampak dari kehidupan beragama yang dapat saling berdampingan secara rukun walaupun dengan keyakinan yang

berbeda. Selain itu budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Humbang Hasundutan terbuka terhadap inovasi, budaya agraris yang telah mengakar di masyarakat dengan adanya budaya “Marsiadapari” atau dalam bahasa Indonesia yang artinya gotong royong.

Sebelum menjadi Kabupaten Humbang Hasundutan telah memiliki nilai-nilai institusi yang dapat dilihat sehari-hari yaitu adanya perkumpulan tokoh-tokoh masyarakat yang telah lama dikenal, dan selain itu masyarakat Humbang Hasundutan telah lama mengenal arisan pungan marga (kelompok marga) serta serikat tolong-menolong. Dan salah satunya yang sejak dulu telah lama berakar di Humbang Hasundutan yaitu “Tolu Sahundulan, Lima Sauduran” yang merupakan sistem kekerabatan di kalangan masyarakat Humbang Hasundutan.

Dengan adanya perubahan pada struktur pemerintahan Humbang Hasundutan menyebabkan terjadinya perubahan pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi di Humbang Hasundutan maka penulis mengangkat judul “PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT HUMBANG HASUNDUTAN (Suatu Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pemekaran) Tahun 1990-2011

B. Identifikasi Masalah

Yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kehidupan sosial budaya masyarakat Humbang Hasundutan,
2. Perubahan yang terjadi pada masyarakat Humbang Hasundutan.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah dituliskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat Humbang Hasundutan menyangkut struktur masyarakat, pendidikan dan pola perilaku masyarakat sebelum dan sesudah pemekaran?
2. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya masyarakat Humbang Hasundutan?
3. Bagaimana wujud perubahan sosial budaya yang terjadi di Humbang Hasundutan?
4. Bagaimana respon masyarakat Humbang Hasundutan terhadap perubahan sosial budaya?

D. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kehidupan sosial budaya masyarakat Humbang Hasundutan sebelum terbentuk menjadi Kabupaten.
2. Untuk mengetahui kehidupan sosial budaya masyarakat Humbang Hasundutan setelah terbentuk menjadi Kabupaten.
3. Bagaimana wujud perubahan sosial budaya yang terjadi di Humbang Hasundutan.
4. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap perubahan Humbang Hasundutan.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi bagi pembaca tentang perubahan sosial budaya yang terjadi di Humbang Hasundutan sebelum dan sesudah pemekaran.
2. Menambah wawasan bagi peneliti tentang sebuah karya ilmiah.
3. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
4. Memenuhi tugas akhir akademis dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri medan.
5. Memperkaya informasi bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui perubahan sosial budaya di Kabupaten Humbang Hasundutan setelah terjadi pemekaran.
6. Memperkaya khasanah sejarah lokal dalam upaya melengkapi sejarah nasional.